

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025**



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***“Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025”*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolingo, 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO



dr. ANANG BUDI YOELIJANTO., M.M.Kes., MMRS

Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 199703 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 2025

TANGGAL : 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Probolinggo, sehingga Renja Perubahan Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD 2025 menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah serta selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan *review* berkala atas implementasinya.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di

daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Renstra lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Renja tahunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo menyusun Renja Perubahan tahun 2025.

Dalam perjalanan waktu bisa terjadi perkembangan yang menyebabkan Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan keadaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka diamanatkan bagi Perangkat Daerah untuk memenuhi ketentuan dimaksud, diantaranya dengan menambah/mengurangi/menggeser anggaran disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo perlu diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, sedangkan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan.

Atas hal tersebut, dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disamping berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo tahun 2024 – 2026, juga diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula keterangan, antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam

mencapai dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi;
3. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2025;
4. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Tenaga Kerja tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang latar belakang Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 s/d TW I (Maret 2025)

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 setelah Perubahan Renja untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2.1. Realisasi Program dan Kegiatan

evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Maret 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Probolinggo s/d Triwulan I (Maret 2025)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) (%)			Unit SKPD (Pena nggun g Jawab)	Ket.		
							I																
1	2	3	4	7			8			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17
				K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp		
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP PD	80	Nilai	7.214.415.568		Nilai	1.504.340.477		Nilai	1.504.340.477		%	20,81		Nilai	1.504.340.477		%	93,42		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	4	dok	42.967.700	1	dok	1.500.000	1	dok	1.500.000	25	%	3,49	4	dok	1.500.000	10,20	%	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	18.130.700	0,00	dok		-	dok	-	0,00	%	0,00	-	dok	-	-	%	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dok	12.837.000	1	dok	1.500.000	-	1	1.500.000	25,00	%	11,68	25	dok	1.500.000	-	%	-		
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	12.000.000	1	laporan			laporan	-	%	0,00	1	laporan	-		%	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	1	dok	5.495.702.637	0,00	dok	1.281.159.760	-	dok	1.281.159.760	-	%	23,34	-	dok	1.498.289.643	-	%	8,46		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	org/bln	5.488.283.337	33	org/bln	1.281.159.760	33	org/bln	1.281.159.760		%	23,34	33	org/bln	1.498.289.643	7,14	%	8,61		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.419.300																	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) (%)			Unit SKPD (Pena nggun g Jawab)	Ket.			
							I																	
1	2	3	4	7			8			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17	
				K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp			K
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum PD	85	%	116.513.600																		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	11.581.000	0,00	paket	0	-	paket	-	0,00	%	0,00	-	pake t	-	-	%	-			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	75.995.700	0,00	paket	0	-	paket	-	0,00	%	0,00	-	pake t	-	-	%	-			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	9.696.000	0,00	paket	0	-	paket	-	0,00	%	0,00	-	pake t	-	-	%	-			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	9.761.900	0,00	paket	0	-	paket	-	0,00	%	0,00	-	pake t	-	-	%	-			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	9.479.000	0,00	paket	0	-	paket	-	0,00	%	0,00	-	pake t	-	-	%	-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang PD	2	laporan	1.445.681.631			221.680.717	9,00	laporan	221.680.717		%	15,33		lapo ran		%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	125.196.347			18.707.200	3	laporan	18.707.200		%	14,94		laporan	-	%	-				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1.320.485.284			202.973.517			202.973.517			15,37									

2025

Dinas Tenaga Kerja

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) (%)			Unit SKPD (Pena nggun g Jawab)	Ket.			
							I																	
				7			8			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%					
1	2	3	4	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	16	17	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	768	orang	6.454.958.400																		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	10	Lembaga	10.000.000																		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10	Lembaga	10.000.000																		
		Rata-rata capaian kinerja (%)											0		0	0	%	0	0	%	0			
		Predikat kinerja											Sangat Rendah		Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Rendah			
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	42,5	%	650.000.000			1.815.000			1.815.000			0,28									
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	85	%	470.000.000			1.500.000			1.500.000			0,32									
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50	orang	10.000.000			1.500.000			1.500.000			15,00									
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50	orang	460.000.000																		

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) (%)			Unit SKPD (Pena nggun g Jawab)	Ket.			
							I																	
1	2	3	4	7			8			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17	
				K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp			
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan	10	Informasi Pasar	150.000.000																		
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1500	orang	150.000.000																		
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) diDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan PMI yang diberikan	20	Orang	30.000.000			1.815.000															
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CalonPekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja MigranIndonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan meningkat Kompetensinya	20	Orang	30.000.000			1.815.000															
Rata-rata capaian kinerja (%)													21,67		53,32	4,70	%	837.232.219	3,94	%	28,98			
Predikat kinerja													Sangat Rendah		Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Rendah			
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	36	%	3.960.185.600		5%	907.149.600	5	%	907.149.600	13,89	%	22,91									
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama	100	%	56.000.000																		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) (%)			Unit SKPD (Pena nggun g Jawab)	Ket.			
							I																	
1	2	3	4	7			8			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17	
				K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp			
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	laporan	56.000.000																		
		Pencegahan dan PenyelesaianHubungan Industrial, Mogok Kerja danPenutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/K ota	Persentase penyelesaian masalah hubungan industrial	100	%	3.904.185.600																		
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2	Perkara	19.000.000																		
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan SosialTenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	18000	Orang	3.885.185.600	200	Orang	907.149.600															

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) (%)			Unit SKPD (Pena nggun g Jawab)	Ket.								
				I			II			III				IV			V			VI												
1	2	3	4	7			8			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17									
				K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp											
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		4,63		7,64	0,00		4.418.825	0,00	%	0,61		
				Predikat kinerja																		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Renda h		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						18.289.559.568			2.414.805.077			2.414.805.077																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													26,30																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													Sangat Rendah																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : kualitas SDM cukup mumpuni																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terlambat sehingga penyerapan anggaran terhambat, aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) belum berjalan optimal																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :																																

Dari Tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 baru terealisasi 20,85 % dari seluruh anggaran tersedia, hal ini disebabkan :

- Merupakan upaya konsistensi sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan riil kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan ;
- Tertundanya sebagian kegiatan karena terpetakannya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja pada triwulan II.

Sehubungan dengan hal diatas, pengelolaan program / kegiatan dan pembinaan SDM serta ketersediaan sarana/prasarana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja Dinas tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Probolinggo

N O	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/kompetensi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Persentase pencari kerja ditempatkan	42%	42,5%	43%	43,5%	42%	42,5%	43%	43,5%
3	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	36%	36,5%	37%	37,5%	36%	36,5%	37%	37,5%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,24	3	2,80	2,60	3,24	-	2,80	2,60
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,63	74,81	75,15	75	69,48	73,18	73,30	73,70
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,81	93,14	92,48	91,81	96,76	96,80	96,83	96,86

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran diperlukan program dan kegiatan yang sesuai. Dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.

Berikut merupakan hal-hal yang perlu disesuaikan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 antara lain :

1. Perlunya Perubahan Anggaran Pada Belanja Modal Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Perlunya Perubahan Anggaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Perlunya Perubahan Anggaran Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
4. Perlunya Perubahan Anggaran Job fair/ Bursa Kerja
5. Perlunya Perubahan Anggaran Perlindungan PMI
6. Perlunya Perubahan Anggaran untuk Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja
pada Perubahan Renja Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NAL					NASIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA								12.804.507.085,00	18.289.559.568,00	18.445.316.545,00	5.640.809.460,00						15.074.131.174,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.804.507.085,00	18.289.559.568,00	18.445.316.545,00	5.640.809.460,00							15.074.131.174,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							12.804.507.085,00	18.289.559.568,00	18.445.316.545,00	5.640.809.460,00							15.074.131.174,00	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP PD				-	80 %	7.374.547.085,00	7.214.415.568,00	6.973.325.997,00	849.584.089,00							8.224.131.174,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu				-	4 Dokumen	150.000.000,00	42.967.700,00	37.130.700,00	-112.869.300,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	18.130.700,00	17.130.700,00	-12.869.300,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	12.837.000,00	9.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu				-	1 Dokumen	4.854.418.864,00	5.495.702.637,00	5.438.667.194,00	584.248.330,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	-		5.983.188.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.824.418.864,00	5.488.283.337,00	5.431.247.894,00	606.829.030,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			5.943.188.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	7.419.300,00	7.419.300,00	-22.580.700,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Tahun																			2025	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD				-	85 %	460.000.000,00	116.513.600,00	96.024.900,00	-363.975.100,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	-		530.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	11.581.000,00	11.581.000,00	-38.419.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	75.995.700,00	55.507.000,00	-244.493.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			330.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	9.696.000,00	9.696.000,00	-20.304.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	9.761.900,00	9.761.900,00	-20.238.100,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	9.479.000,00	9.479.000,00	-40.521.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD				-	2 Laporan	1.300.628.221,00	1.445.681.631,00	1.287.953.203,00	-12.675.018,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	-		1.390.943.174,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	183.685.047,00	125.196.347,00	102.098.019,00	-81.587.028,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.116.943.174,00	1.320.485.284,00	1.185.855.184,00	68.912.010,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			1.200.943.174,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				-	6 Unit	609.500.000,00	113.550.000,00	113.550.000,00	-495.950.000,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	90.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	12.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	69.000.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	-57.950.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2,	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun Persentase dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun				-	0 37 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00						0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun				-	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya				-	40,5 %	4.435.000.000,00	6.464.958.400,00	6.456.223.000,00	1.285.000.000,00						5.720.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus pelatihan				-	800 Orang	4.395.000.000,00	6.454.958.400,00	6.454.958.400,00	2.059.958.400,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-	5.700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				560 Orang	800 Orang	4.375.000.000,00	6.454.958.400,00	6.454.958.400,00	2.079.958.400,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		5.700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	10 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi				-	10 Lembaga	10.000.000,00	10.000.000,00	1.264.600,00	-8.735.400,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	10.000.000,00	10.000.000,00	1.264.600,00	-8.735.400,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan				-	10 LPK	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																	

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025																				
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				10 Perizinan	10 Perizinan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi				-	85 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0 001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				10 Perusah aan	10 Perusah aan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya				-	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0 001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase pencari kerja yang ditempatkan				-	43 0 %	754.960.000,00	650.000.000,00	540.416.948,00	155.040.000,00							910.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja				-	85 %	504.960.000,00	470.000.000,00	457.710.000,00	-47.250.000,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0 002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0 003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	10.000.000,00	7.710.000,00	-22.290.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0 004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0 005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				240 Orang	102 Orang	434.960.000,00	460.000.000,00	450.000.000,00	15.040.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan				-	10 Informasi Pasar Kerja	220.000.000,00	150.000.000,00	64.370.500,00	-155.629.500,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0 003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1000 Orang	50 Orang	220.000.000,00	150.000.000,00	64.370.500,00	-155.629.500,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU		240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah perlindungan PMI yang diberikan</i>				-	20 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	18.336.448,00	-11.663.552,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0 001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	30.000.000,00	18.336.448,00	8.336.448,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0 002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0 003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
5,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				-	0 37 %	220.000.000,00	3.960.185.600,00	4.475.350.600,00	0,00							220.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama</i> <i>Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama</i>				-	100 %	170.000.000,00	56.000.000,00	35.310.000,00	-134.690.000,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0 001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online</i>				24 Perusah aan	24 Perusah aan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0 002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>				15 Perusah aan	15 Perusah aan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0 003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	56.000.000,00	35.310.000,00	-114.690.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial</i>				-	100 %	50.000.000,00	3.904.185.600,00	4.440.040.600,00	4.390.040.600,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0 001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				2 Perkara	2 Perkara	10.000.000,00	19.000.000,00	14.855.000,00	4.855.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0 002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				2 Perkara	2 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0 003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025																				
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0 004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0 005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0 005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	25540 Orang	0,00	3.885.185.600,00	4.425.185.600,00	4.425.185.600,00	-	DBH CUKAI HASIL TEBKAU (CHT)	-	MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER- SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H								12.804.507.085,00	18.289.559.568,00	18.445.316.545,00	- 20.933.607.301,18					15.074.131.174,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 semester I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Renja Perubahan ini merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



dr. ANANG BUDI YOELIJANTO, M.MKes., MMRS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 199703 1 004